

# VERBAL

1. Dikerjakan oleh : BPMPK KOTA BIMA

2. Diperiksa oleh : BAGIAN HUKUM

3. Diedarkan oleh : BPMPK
4. Diterima di Penerimaan Surat : BAGIAN HUKUM

5. Dinomor oleh : BAGIAN HUKUM

6. Diketik oleh : BPMPK

7. Ditaklik/ Dikaji oleh : BAGIAN HUKUM





8. Diterima di Pengiriman Surat : BPMPK

9. Dikirim oleh : BPMPK

10. Verbal dan Pertiinggal Disimpan oleh : BAGIAN HUKUM

DIAJUKAN PADA TANGGAL : Desember 2016

PERIHAL : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN DI  
KOTA BIMA

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPMPK Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:  
WALIKOTA BIMA, 

M. QURAISS H. ABIDIN



**WALIKOTA BIMA**

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 68 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN  
DI KOTA BIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BIMA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan perlu upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan di Kelurahan, perlu dilakukan perlombaan lingkup Kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab, efektif serta mencapai sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan lingkup Kelurahan di Kota Bima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor; 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 172);
12. Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 248);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN LINGKUP KELURAHAN DI KOTA BIMA.**

✓ ✓

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima yang terdiri atas Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Bima.
10. Perlombaan Lingkup Kelurahan adalah Evaluasi dan Penilaian Perkembangan berbagai sektor Pembangunan atas usaha Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bersama Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.
11. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kerja Kecamatan.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bima.

## BAB II PEYELENGGARAAN PERLOMBAAN

### Pasal 2

Jenis-jenis Perlombaan Lingkup Kelurahan dimaksud adalah:

- a. Perlombaan Kelurahan
- b. Perlombaan Kebersihan
- c. Perlombaan Keamanan dan Ketertiban
- d. Perlombaan Lainnya

### Pasal 3

- (1) Perlombaan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan sampai tingkat Regional.
- (2) Peserta perlombaan di tingkat kecamatan diikuti oleh Kelurahan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lomba Kelurahan dari setiap Kecamatan.
- (3) Peserta Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima diikuti oleh juara pertama Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan.
- (4) Peserta Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi diikuti oleh juara pertama Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima.

### Pasal 4

- (1) Perlombaan Kebersihan Kelurahan dilaksanakan di Tingkat Kota Bima.
- (2) Peserta Perlombaan Kebersihan Kelurahan diikuti oleh seluruh kelurahan di Kota Bima.

*Handwritten signature*



#### Pasal 5

- (1) Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan dilaksanakan di Tingkat Kota Bima.
- (2) Peserta Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan diikuti oleh seluruh Kelurahan di Kota Bima.

### BAB III WAKTU PENYELENGGARAAN

#### Pasal 6

- (1) Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap tahun pada bulan April
- (2) Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan setiap tahun pada bulan Mei.

#### Pasal 7

Perlombaan Kebersihan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember.

#### Pasal 8

Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Agustus dan bulan Nopember.

### BAB IV PENILAIAN

#### Pasal 9

Penilaian Perlombaan Kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat Perkembangan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil Kelurahan sesuai indikator penilaian.

#### Pasal 10

Juara Pertama Perlombaan Kelurahan masing-masing tingkatan adalah Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

#### Pasal 11

Indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

Penilaian Perlombaan Kebersihan Kelurahan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan indikator penilaian di Kelurahan.

#### Pasal 13

Juara Pertama Perlombaan kebersihan Kelurahan adalah Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

#### Pasal 14

Indikator dan skor Penilaian Perlombaan Kebersihan Kelurahan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

Penilaian Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan Indikator Penilaian di Kelurahan.

#### Pasal 16

Juara Pertama Perlombaan Keamanan dan Ketertiban adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

#### Pasal 17

Indikator dan skor Penilaian Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

### BAB V TIM PENILAI

#### Pasal 18

- (1) Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian perlombaan kelurahan untuk menentukan Juara Perlombaan Kelurahan tingkat Kecamatan.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima Anggotanya terdiri dari Unsur Perangkat Kota Bima dan Tim Penggerak PKK Kota Bima.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian perlombaan Kelurahan untuk menentukan juara perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima.

#### Pasal 20

- (1) Tim Penilai Perlombaan Kebersihan Kelurahan terdiri dari Unsur Perangkat Kota Bima dan Tim Penggerak PKK Kota Bima.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian perlombaan kebersihan Kelurahan untuk menentukan juara perlombaan Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota Bima.

#### Pasal 21

- (1) Tim Penilai Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan terdiri dari Unsur Perangkat Kota Bima, Kepolisian Resor Bima Kota dan Kodim 1608 Bima.

*Handwritten signature*



- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan penilaian perlombaan keamanan dan ketertiban kelurahan untuk menentukan juara perlombaan keamanan dan ketertiban tingkat Kota Bima.

## BAB VI PENETAPAN JUARA

### Pasal 22

- (1) Juara-Juara perlombaan kelurahan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara-Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Juara-Juara Perlombaan Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Juara-Juara Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Tingkat Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 23

- (1) Juara I (pertama) perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima.
- (2) Juara I (pertama) perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Penghargaan kepada Juara-Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat.
- (2) Penghargaan kepada Juara-Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bima diberikan oleh Walikota.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, Piala dan bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

### Pasal 25

- (1) Penghargaan kepada Juara-Juara Perlombaan Kebersihan Kelurahan Tingkat Kota Bima diberikan oleh Walikota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, dan bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Penghargaan kepada Juara-Juara Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Tingkat Kota Bima diberikan oleh Walikota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, Piala dan bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.



## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 27

Segala Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlombaan Lingkup Kelurahan di Kota Bima dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Walikota.
- (2) Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur.

### Pasal 29

Pelaksanaan Perlombaan Kebersihan Kelurahan dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana kepada Walikota.

### Pasal 30

Pelaksanaan Perlombaan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana kepada Walikota.

### Pasal 31

Pelaksanaan Perlombaan lainnya di Kelurahan dilaporkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kepada Walikota.



## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal, 21 Desember 2016

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH ABIDIN.

Di undangkan di Kota Bima,  
pada tanggal, 21 Desember 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 326





LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BIMA  
 NOMOR 68 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
 LINGKUP KELURAHAN KOTA BIMA

INDIKATOR PERLOMBAAN KELURAHAN  
 A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana Prasarana	a. Gedung kantor			
		ADA, DI RUMAH PRIBADI	1	1	
		ADA, SEWA	2	2	
		ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN	3	3	
		ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	4	4	
		b. Gedung Pertemuan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN	2	2	
		ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	3	3	
		c. Perangkat Kelurahan			
		50% BUKAN PNS	1	1	
		DI ATAS 50% PNS	2	2	
		d. Mesin tik/ komputer			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

*[Handwritten signature]*

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		e. Kendaraan dinas lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumber Daya Listrik Terbuat dari apa?
		f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		h. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		j. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Akuntabilitas	Kotak Pengaduan Masyarakat TIDAK ADA ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN ADA DAN DIMANFAATKAN	1 2 3	1 2 3	



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
4.	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Laporan Tahunan Lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Papan Informasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Loker Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Buku Registrasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Buku Profil Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		g. Buku Administrasi Umum TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		h. Buku Administrasi Kependudukan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		i. Buku Administrasi Keuangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		j. Buku Administrasi Pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		k. Buku Administrasi Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		l. Kartu Uraian Tugas TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		n. Peta Batas Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. KINERJA					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA</li> <li>- Fasilitas dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat TIDAK ADA ADA</li> </ul>	1 2	1 2	
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		c. Pembinaan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA</li> <li>- <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat TIDAK ADA ADA</li> </ul>	1 2  1 2	1 2  1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		d. Budaya Kerja - apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin TIDAK YA - apakah telah memiliki standar jam pelayanan TIDAK YA - apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA	1 2  1 2  1 2	1 2  1 2  1 2	
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Inisiatif dan kreativitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur			



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		IV. KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ E-GOVERNMENT			
		1. Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet			
		a. Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Website Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
2.	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi - Administrasi umum TIDAK ADA ADA - Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA - Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA - Administrasi pembangunan TIDAK ADA ADA - Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA	1 2  1 2  1 2  1 2  1 2	1 2  1 2  1 2  1 2	



NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN .....)	TAHUN KE-2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan

e v



## B. BIDANG KEWILAYAHAN

NO.	IDENTITAS/KONDISI		KETERANGAN												
1	2		3												
<b>I. IDENTITAS KELURAHAN</b>															
1.	Nama	:													
2.	Kode	:													
3.	Tipologi (LINGKARI YANG SESUAI)	:	Pantai/Dataran Rendah/Pegunungan/Pertanian												
4.	Orbitasi Wilayah ke Kota (LINGKARI YANG SESUAI)	:	1. Lebih dari 6 jam 2. 5-6 jam 3. 3-4 jam 4. 1-2 jam 5. Kurang dari 1 jam												
5.	Kondisi Wilayah	:	1. Ada di Ibukota kecamatan/di luar Ibukota kecamatan 2. Rawan Bencana/Tidak												
<b>II. BATAS</b>															
1.	Batas Kelurahan	:	Tidak Ada Ada												
2.	Penetapan batas dengan ordinat	:	TIDAK ADA ADA												
3.	Komposisi Umur		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tahun 1</th> <th>Tahun 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kurang dari 15 Tahun</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lebih dari 56 tahun</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tahun 1	Tahun 2	Kurang dari 15 Tahun	:		Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:		Lebih dari 56 tahun	:	
	Tahun 1	Tahun 2													
Kurang dari 15 Tahun	:														
Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:														
Lebih dari 56 tahun	:														
4.	Jumlah penduduk menurut gender (BANYAK ORANG)														
	Jumlah penduduk total	:													
	Jumlah penduduk laki-laki	:													
	Jumlah penduduk perempuan	:													
	Jumlah kepala keluarga	:													

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Kelembagaan Inovasi	a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i> ). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		b. Adanya peta rencana ( <i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Jejaring Inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMKel.). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kota, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Budaya Masyarakat Inovasi	a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	Lampirkan semua bukti
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi	a. Adanya integrasi antara peta rencana ( <i>roadmap</i> ) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Bukti Lengkap
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif ( <i>Heksagonal</i> ) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan produk unggulannya dan lembaga/unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari Pemerintah Kelurahan atau pihak ke tiga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA					
1.	Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Peta Risiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya			



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat	a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk di Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ....)	TAHUN KE- 2 (THN ....)	
1	2	3	4	5	6
4.	Infrastruktur Evakuasi	a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Kelurahan	a. Investasi yang masuk ke Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Apakah melibatkan Pemerintah Kelurahan TIDAK YA	1 2	1 2	
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Kelurahan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

22



## C. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PARTISIPASI MASYARAKAT</b>					
1.	Musyawarah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 5	1 5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan TIDAK SEIMBANG SEIMBANG	1 3	1 3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1 2	1 2	
4.	Gotong Royong Penduduk Kelurahan 2 Tahun Terakhir	Aktifitas Gotong Royong Penduduk TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
<b>II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>					
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

28

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Gotong Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	



NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET	
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)		
1	2	3	4	5	6	
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)						
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4		
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2		
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2		
		Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2		
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
1.	Pengamanan Lingkungan Manusia	Dan	a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
			b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
			c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Konflik berbau agama/kepercayaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
3.	Perkelahian	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
4.	Pencurian dan perampokan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	



NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
5.	Perjudian	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
6.	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah kelurahan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
7.	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk kelurahan setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk kelurahan setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
10.	Kekerasan dalam Keluarga	a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
V. PENDIDIKAN					
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
		b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	





NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah penduduk tamat D3/Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
VI. KESEHATAN					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 2	1 2	
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2 1	2 1	
3.	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1 4	1 4	
4.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		c. Total RT pengguna MCK umum MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		f. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	



NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
5.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Jamban Keluarga/MCK TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VII. EKONOMI					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja KURANG DARI 10% LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	4 1	4 1	
2.	Mata Pencaharian/Sumber Pendapatan ( <i>Checklist</i> mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian			
		Industri			
		Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Toko/Kios TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1.	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN





LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
LINGKUP KELURAHAN KOTA BIMA

INDIKATOR PERLOMBAAN KEBERSIHAN

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KET.
			Sangat Jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
			30-45	46-60	61-70	71-80	81-90	
KEBERSIHAN DAN KETEDUHAN								
A. PEMUKIMAN								
1. Menengah dan Sederhana	a. Area Pemukiman	Sampah termasuk Gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit sampah	Tidak ada sampah/sangat bersih	
	b. Drainase	Sampah (termasuk gulma dan sedimen)	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di seluruh sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di seluruh sebagian kecil selokan dari menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	
	c. RTH (semua yang ada lahan wajib dinilai pohon peneduhnya)	1. Pohon peneduh sebaran	Tidak ada pohon peneduh	Ada di seperempat lokasi	Ada di setengah lokasi	Ada di tiga perempat lokasi	Ada di seluruh lokasi	
		2. Pohon peneduh fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di seperempat lokasi	Memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi	Memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
		3. Penghijauan	Tidak ada penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di seperempat lokasi	Memenuhi fungsi penghijauan di setengah lokasi	Memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi	Memenuhi fungsi penghijauan di seluruh lokasi	



*Handwritten signature/initials*

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KETERANGAN
			Sangat jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
			30-45	46-60	61-70	71 - 80	81 - 90	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	d. TPS (tidak berlaku untuk yang diangkut langsung ke TPA)	1) Bangunan Fisik	tidak ada bangunan fisik	ada, terbuka, tidak terawat	ada, terbuka, terawat / tertutup tidak terawat	ada, tertutup, terawat		
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS/kontener	berserakan di luar TPS/kontener	bertumpun di tempat tertentu di luar TPS/kontener	sebagian kecil di luar TPS/kontener	Tidak ada sampah di luar TPS/kontener	
	e. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan	Tidak Ada			Ada		
		2) Proses Pemilahan	Tidak Dipilah		dipilah sebagian/tempat sampah kosong		dipilah seluruhnya	
	f. Pengolahan sampah	1) sarana pengolahan sampah	Tidak Ada			Ada		
		2) Proses Pengolahan Sampah	tidak ada proses pengolahan		ada proses pengolahan tapi tidak kontinu		ada proses pengolahan sampah dan kontinu	
B. SARANA								
1. JALAN								
A. Arteri/utama	1) Area Jalan	a) Sampah (termasuk gulma)	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit Sampah	Tidak ada sampah/sangat bersih	



LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KETERANGAN
			Sangat jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
			30-45	46-60	61-70	71 - 80	81 - 90	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		b) Fisik Trotoar (hanya yang mempunyai trotoar)	tidak ada trotoar/tempat pejalan kaki	ada ruang berupa tanah dan tidak nyaman untuk pejalan kaki	Ada, tidak terawat dan tidak nyaman untuk pejalan kaki	Ada, kurang terawat, tapi nyaman untuk pejalan kaki	Ada, terawat, dan nyaman untuk pejalan kaki	
	2) RTH	a) Pohon Peneduh; Sebaran	tidak ada pohon peneduh	ada di seperempat lokasi ( $\leq 25\%$ )	ada di setengah lokasi ( $\pm 50\%$ )	ada di tiga perempat lokasi ( $\leq 75\%$ )	ada di seluruh lokasi	
		2) pohon peneduh; fungsi	tidak memenuhi fungsi peneduh	memenuhi fungsi pereduh di seperempat lokasi ( $\leq 25\%$ )	memenuhi fungsi peneduh di setengah lokasi ( $\pm 50\%$ )	memenuhi fungsi peneduh di tiga perempat lokasi ( $\pm 75\%$ )	memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
	3) Drainase	Sampah (termasuk gulma dan sedimen)	bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	bertumpuk di seluruh sebagian besar selokan dan menyumbat	bertumpuk di seluruh sebagian kecil selokan dan menyumbat	ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	
	4) PKL (khusus yang ada PKL)	a) Fisik Lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki serta lapak seragam	
		b) Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit Sampah	Tidak ada sampah/sangat bersih	
		c) Tempat Sampah	Tidak ada		Ada			

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KET.
			Sangat Jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
C. BANK SAMPAH	Keberadaan Bank Sampah	1. Pengurus	1. Tidak ada	ada				
		2. Bangunan Fisik			Tidak mempunyai bangunan khusus dan tidak memiliki tempat penyimpanan	Mempunyai bangunan khusus bank sampah semi permanen dan memiliki tempat penyimpanan	Mempunyai bangunan khusus bank sampah yang permanen dan memiliki tempat penyimpanan yang terpilih sesuai jenis sampah	
		3. Sistem pencatatan			Sudah menggunakan sistem pencatatan secara manual tetapi tidak menerbitkan buku tabungan atau tidak menggunakan sistem pencatatan secara manual tetapi menerbitkan buku tabungan	Sudah menggunakan sistem pencatatan secara manual dan menerbitkan buku tabungan	Sudah menggunakan sistem pencatatan dengan komputer dan menerbitkan buku tabungan serta kartu ATM	

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAI H. ABIDIN





LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN  
LINGKUP KELURAHAN KOTA BIMA


INDIKATOR PERLOMBAAN KEAMANAN KETERTIBAN

NO	PENGORGANISASIAN	PELAKSANAAN		SKOR PENILAIAN			JUMLAH	KET.
		ADA	TIDAK	A	B	C		
				0 - 30	31 - 65	66 - 100		
I	Pengorganisasian Instruktur							
II	Daftar Nama Pos Kamling							
III	Bhabinkamtibmas/LPM							
IV	Jadwal Tugas							
	Jumlah							
POS KAMLING DAN PERLENGKAPANNYA								
1	a. Pos kamling ukuran 2,5mx3m/2mx2m							
	b. Terdiri dari 2 ruangan:							
	- Ruangan jaga							
	- Ruangan istirahat							
	Jumlah							
BENTUK POS KAMLING								
2	Bangunannya/kondisi							
3	Letak bangunan Pos Kamling							
	Jumlah							

11/9

PERLENGKAPAN/SARANA POS KAMLING/INVENTARIS								
4	Kantong/Alarm/lonceng							
5	Pentungan/Tongkat							
6	Senter/Obor							
7	Lampu Petromak/Emergency							
8	Borgol/Tali Pengikat							
9	Kotak P3K							
10	Ban Kamling							
11	Alat Pemadam Kebakaran/Goni Basah							
12	Buku Mutasi Penjagaan							
13	Buku Tamu							
14	Jam Dinding							
15	Jas hujan/Jaket							
16	Pengeras suara/Megaphone							
17	Peta Dusun/Jorong							
18	Papan nama Pos Kamling							
19	Telepon/HP							
20	Pangsap							
	Jumlah							

 WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN





